

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa peran UN Women dalam mengatasi diskriminasi terhadap perempuan di Indonesia, dengan fokus khusus pada fokus kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) selama pandemi COVID-19 pada tahun 2020-2022. Pandemi COVID-19 telah memperburuk situasi KDRT di berbagai negara, termasuk Indonesia, di mana pembatasan sosial dan kondisi ekonomi yang sulit meningkatkan kerentanan perempuan terhadap kekerasan domestik.

Pandemi COVID-19 juga membawa berbagai tantangan baru bagi perempuan di Indonesia, terutama mengenai hal tentang kekerasan dalam rumah tangga. Pembatasan sosial tersebut diberlakukan untuk mencegah penyebaran virus secara tidak langsung meningkatkan risiko kekerasan terhadap perempuan. Berdasarkan data yang dianalisis, terdapat peningkatan signifikan dalam laporan kasus KDRT selama periode pandemi. Faktor-faktor penyebab peningkatan ini termasuk tekanan ekonomi, ketidakpastian masa depan, dan pembatasan sosial yang memperburuk situasi rumah tangga yang sudah rentan.

UN Women, sebagai organisasi turunan PBB yang bertugas mempromosikan penyetaraan gender serta pemberdayaan perempuan, telah berperan signifikan dalam menangani isu KDRT selama pandemi. Organisasi ini mengimplementasikan berbagai program dan inisiatif untuk mendukung perempuan yang terkena dampak KDRT. Salah satu kampanye utama adalah "The Shadow Pandemic," yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran tentang peningkatan kekerasan berbasis gender selama pandemi dan menyediakan dukungan bagi para korban.

Di Indonesia, UN Women bermitra dengan pemerintah serta organisasi non-pemerintah dalam memperkuat kebijakan maupun layanan yang melindungi perempuan dari kekerasan. Program-program yang diimplementasikan oleh UN Women di Indonesia termasuk penyediaan tempat aman bagi korban KDRT, layanan psikologis, dan pelatihan keterampilan untuk pemberdayaan ekonomi. Kampanye "The Shadow Pandemic" menyoroti lonjakan kekerasan terhadap perempuan yang dirasakan seiring dengan terjadinya pandemi COVID-19. Melalui kampanye ini, UN Women berupaya untuk meningkatkan kesadaran publik, memperkuat sistem dukungan bagi korban, dan mendorong pemerintah untuk mengambil tindakan lebih tegas dalam menangani KDRT. Kampanye ini mencakup berbagai kegiatan advokasi, termasuk penyebaran informasi melalui media sosial, pelatihan bagi penegak hukum, dan penyediaan layanan darurat bagi korban.

Dalam konteks di Indonesia, UN Women telah menjalankan berbagai inisiatif untuk mengatasi KDRT selama pandemi. Salah satu program unggulan adalah "Women and Girls at the Center of COVID-19 Prevention," yang bertujuan untuk memberikan perlindungan untuk perempuan dan anak perempuan dari diskriminasi dan kekerasan selama krisis kesehatan global ini. Program ini mencakup penyediaan bantuan langsung, seperti makanan dan perlengkapan kesehatan, serta layanan psikososial bagi korban KDRT. Program 'Cash-for-Work' adalah salah satu inisiatif yang bertujuan untuk mendukung pemberdayaan ekonomi perempuan yang terdampak oleh ketimpangan gender dan pandemi. Melalui program ini, perempuan diberikan pelatihan keterampilan dan kesempatan kerja sementara yang membantu mereka memperoleh penghasilan dan mengurangi risiko kekerasan berbasis ekonomi. Program ini juga berfungsi sebagai langkah awal bagi perempuan untuk memulai usaha kecil yang berkelanjutan dan mandiri secara finansial.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun UN Women telah berkontribusi secara signifikan dalam upaya mengatasi diskriminasi dan kekerasan terhadap

perempuan di Indonesia selama masa pandemi COVID-19, masih terdapat banyak tantangan yang perlu diatasi. Diperlukan pendekatan yang lebih komprehensif dan dukungan yang lebih luas untuk memastikan keberhasilan jangka panjang dari upaya-upaya tersebut. Dukungan dari seluruh elemen masyarakat, termasuk organisasi non-pemerintah, pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat luas, semunyanya berperan penting untuk mencapai kesetaraan gender dan memberantas kekerasan terhadap perempuan.

Untuk mencapai tujuan tersebut, peningkatan alokasi sumber daya untuk program-program yang mendukung perempuan korban KDRT menjadi sangat penting. Kampanye yang lebih intensif untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai isu KDRT dan hak-hak perempuan juga perlu dilakukan. Kerja sama antara pemerintah, UN Women, dan organisasi non-pemerintah harus diperkuat untuk menciptakan kebijakan yang lebih efektif dan layanan yang lebih komprehensif. Penanganan hambatan budaya melalui pendidikan dan pelibatan tokoh masyarakat dalam upaya mengurangi diskriminasi dan kekerasan berbasis gender juga sangat diperlukan. Pendidikan ini harus dimulai dari tingkat dasar untuk membentuk sikap yang menghargai kesetaraan gender sejak dini.

Penelitian ini menekankan bahwa meskipun berbagai upaya yang sudah dilakukan oleh UN WOMEN telah memberikan dampak positif, dukungan yang berkelanjutan dan kolaborasi yang lebih erat antara berbagai pemangku kepentingan diperlukan untuk mencapai perubahan yang signifikan dan berkelanjutan dalam mengatasi diskriminasi dan kekerasan terhadap perempuan di Indonesia.

5.2 Saran

Sebagai mahasiswa Hubungan Internasional, peneliti wajib memiliki kepedulian terhadap isu-isu global dan peran organisasi internasional dalam mengatasi permasalahan sosial, beberapa saran berikut diharapkan dapat

meningkatkan efektivitas upaya mengatasi diskriminasi dan kekerasan terhadap perempuan di Indonesia khususnya KDRT:

1. Peningkatan Sumber Daya dan Infrastruktur

Pemerintah serta organisasi terkait diharapkan dapat meningkatkan alokasi sumber daya untuk program-program yang mendukung perempuan penyintas Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Sumber daya tersebut mencakup penyediaan tempat perlindungan yang aman, layanan psikologis, dukungan hukum, serta bantuan ekonomi bagi para korban. Infrastruktur pendukung seperti hotline darurat dan pusat krisis juga perlu diperluas dan ditingkatkan kualitasnya. Penyediaan tempat perlindungan yang memadai dan layanan kesehatan mental bagi korban merupakan langkah esensial untuk memastikan bahwa mereka menerima bantuan yang dibutuhkan dengan cepat dan tepat. Sebagai mahasiswa Hubungan Internasional, pemahaman akan pentingnya bantuan teknis dan finansial dari aktor-aktor internasional dalam mendukung peningkatan sumber daya dan infrastruktur ini menjadi sangat relevan.

2. Penyuluhan Kesadaran Publik

Diperlukan penyuluhan atau kampanye yang lebih intensif dan berkelanjutan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai isu KDRT dan hak-hak perempuan. Kampanye ini harus menjangkau seluruh lapisan masyarakat, termasuk di daerah-daerah terpencil. Pemanfaatan media massa dan media sosial secara optimal sangat penting untuk menyebarkan informasi dan mengedukasi masyarakat tentang pentingnya kesetaraan gender dan pencegahan kekerasan terhadap perempuan. Kampanye tersebut dapat melibatkan tokoh masyarakat, selebritas, dan influencer untuk menarik perhatian publik dan mengubah persepsi negatif tentang peran perempuan dalam masyarakat. Sebagai mahasiswa Hubungan Internasional, pemahaman mengenai strategi komunikasi global dan kampanye internasional dapat memberikan perspektif tambahan dalam merancang kampanye kesadaran yang efektif.

3. Penguatan Kolaborasi Lintas Sektor

Kerja sama antara pemerintah, UN Women, organisasi non-pemerintah, serta sektor swasta perlu diperkuat untuk menciptakan kebijakan yang lebih efektif dan layanan yang lebih komprehensif. Kolaborasi ini harus mencakup pelatihan bagi penegak hukum, penyedia layanan kesehatan, dan pekerja sosial tentang penanganan kasus KDRT. Selain itu, diperlukan koordinasi yang lebih baik dalam memberikan dukungan kepada korban agar mereka mendapatkan perlindungan yang menyeluruh. Kolaborasi lintas sektor ini juga dapat meningkatkan efisiensi dalam penggunaan sumber daya dan memperkuat jaringan dukungan bagi perempuan korban KDRT. Sebagai mahasiswa Hubungan Internasional, penting untuk memahami dinamika kerja sama internasional dan peran berbagai aktor dalam menangani isu-isu global.

4. Pendekatan Budaya dan Pendidikan

Mengatasi hambatan budaya yang sering kali menjadi penghalang dalam upaya pemberantasan KDRT adalah hal yang sangat krusial. Pendidikan tentang kesetaraan gender harus dimulai sejak dini di sekolah-sekolah, serta melibatkan tokoh masyarakat dan pemuka agama dalam upaya mengubah norma-norma sosial yang diskriminatif. Program-program pelatihan dan pemberdayaan yang sensitif terhadap budaya lokal perlu dikembangkan untuk memastikan bahwa program-program tersebut sesuai dengan konteks lokal dan efektif dalam mengurangi diskriminasi dan kekerasan berbasis gender. Edukasi ini dapat dilakukan melalui kurikulum sekolah, seminar, dan diskusi publik yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Sebagai mahasiswa Hubungan Internasional, kesadaran akan pentingnya pendekatan yang menghormati budaya lokal dalam implementasi program internasional menjadi sangat penting.

5. Pemberdayaan Ekonomi Perempuan

Program pemberdayaan ekonomi seperti 'Cash-for-Work' dan pelatihan keterampilan harus diperluas untuk membantu perempuan memperoleh kemandirian finansial. Kemandirian ekonomi merupakan faktor kunci dalam mengurangi ketergantungan perempuan pada pelaku kekerasan serta meningkatkan kemampuan mereka untuk melarikan diri dari situasi kekerasan. Dukungan untuk pengembangan usaha kecil dan akses ke layanan keuangan juga harus ditingkatkan. Program-program ini dapat memberikan pelatihan kewirausahaan, bantuan modal usaha, serta mobilitas ke pasar untuk hasil produk yang telah dibuat oleh perempuan. Sebagai mahasiswa Hubungan Internasional, pemahaman tentang dinamika ekonomi global dan pemberdayaan ekonomi perempuan di berbagai negara dapat memberikan wawasan tambahan dalam merancang program yang efektif.

6. Monitoring dan Evaluasi

Program-program dan inisiatif yang dijalankan harus memiliki proses monitoring serta evaluasi yang jelas dan kuat guna memastikan bahwa program-program tersebut terlaksana dengan efektif dan memberikan dampak positif. Evaluasi berkala akan membantu mengidentifikasi hambatan dan peluang perbaikan, serta memastikan bahwa intervensi yang dilakukan tetap relevan dan adaptif terhadap perubahan kondisi di lapangan. Pengumpulan data yang akurat dan analisis yang mendalam tentang efektivitas program sangat penting untuk meningkatkan kualitas intervensi dan mendukung pengambilan keputusan yang berbasis bukti. Sebagai mahasiswa Hubungan Internasional, kesadaran akan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam implementasi program internasional sangat relevan dalam konteks ini.

7. Penguatan Kebijakan dan Peraturan

Pemerintah perlu memperkuat kebijakan dan peraturan yang melindungi perempuan dari kekerasan, serta memastikan implementasi yang konsisten dan adil.

Penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku KDRT dan perlindungan hukum yang memadai bagi korban harus menjadi prioritas. Selain itu, diperlukan kebijakan yang mendukung pemberdayaan perempuan secara keseluruhan, baik di bidang pendidikan, kesehatan, maupun ekonomi. Pemerintah juga harus memastikan bahwa kebijakan yang ada diimplementasikan dengan efektif dan mengawasi pelaksanaannya secara ketat. Sebagai mahasiswa Hubungan Internasional, pemahaman tentang kebijakan internasional dan implementasinya di tingkat nasional dapat memberikan perspektif tambahan dalam mendorong kebijakan yang lebih efektif.

Dengan menerapkan saran-saran di atas, diharapkan upaya untuk mengatasi diskriminasi dan kekerasan terhadap perempuan di Indonesia dapat lebih efektif dan berkelanjutan. Dukungan dari seluruh elemen masyarakat, termasuk pemerintah, sektor swasta, organisasi non-pemerintah, juga masyarakat luas, semuanya berperan penting dalam mencapai kesetaraan gender dan memberantas kekerasan terhadap perempuan. Upaya kolaboratif dan komprehensif ini diharapkan dapat membawa perubahan positif yang signifikan dalam kehidupan perempuan di seluruh Indonesia, untuk mengusahakan lingkungan yang aman, adil, serta setara bagi seluruh kalangan. Sebagai mahasiswa Hubungan Internasional, pemahaman tentang peran aktor-aktor global dan kerja sama internasional dalam mengatasi isu-isu ini sangat penting untuk berkontribusi secara efektif dalam upaya global yang lebih luas.